

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asikin, Zainal. (2001) *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azwar , Sarifuddin Azwar. (1998) *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady,Munir. (2014) *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Sutrisno. (1986) *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.
- Hartono, Siti Soemarti dalam Sri Rejeki Hartono. (2001) *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Rahayu. (2009) *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbiterase*, Jakarta: Kencana.
- Ibrahim ,Johny. (2016) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: PT Rosdakarya.
- Ibrahim, Johnny. (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Imran , Nating. (2005) *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Hadjon, Philipus. (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Mamujdi, Sri, Dkk. (2005) *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. (2015) Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007) Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meher, Robert I. (2011) Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Jakarta: Salemba Empat.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2003) Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Retnowulan, Sutantio. (1996) Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan, Jakarta: Penerbit Seri Varia Yustisia.
- Sastrawidjaja, Man S. (2006) Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, Ricardo. (2015) Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2002) Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Jakarta: Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. (1998) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Subhan, M. Hadi. (2009) Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan, Jakarta: Kencana.
- Sinaga, Syamsudin Manan. (2012) Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta: PT Tatanusa.
- Sumardjono, Maria S.W. (1996) Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar, Jakarta: Gramedia.
- Sutedi, Adrian. (2014) Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta: Rais Asas Sukses Penebar Swadaya Grup.

Tobink, Riduan dan Bill Nikholaus. (2003) Kamus Istilah Perbankan, Jakarta: Atalya Rileni Sudeco.

Usman, Rachmadi. (2004) Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004

#### **ARTIKEL / KARYA ILMIAH LAINNYA**

Alwi. (2021) Tinjauan Yuridis Upaya Pengajuan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Oleh Nasabah Asuransi, Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, Vol. 7, No. 4.

Chumalda, Zandra Vandawati. (2013) Prinsip Itikad Baik dan Perlindungan Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Jiwa, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Unibersitas Airlangga, 2013.

Disemadi, Hari Sutra dan Danial Gomes.(Februari 2021) Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewargenegaraan Undikhsa, Vol. 9, No. 1.

Hariato, Dedi, Prayogo Hindrawan, Sunarmi, dan Budiman Ginting. (2023) Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 8.

Hartono, Dedy Tri. (2016) Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol. 4.

Hidayah, Daimul. (2024) Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Asuransi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1.

Iryani, Dewi, Boas Parlindungan Panjaitan, dan Ismail. (Januari 2023) Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi, SETARA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1.

Kapoyos,Nelson. (Desember 2017) Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan, Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 3.

**Natasha Aulia Hakimah, 2026**

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ASURANSI DAN PERLINDUNGAN KREDITOR PEMEGANG POLIS (Analisis Putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)**

UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- Lanisya, Amanda dan Faisal Santiago. (2025) Legal Protection for Policyholders Against PT Asuransi Jiwa Kresna's Default Based on the Supreme Court Decision No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, Vol. 3, No. 4.
- Magribi, Imam, Dkk. (2017) Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit yang Diajukan Oleh Debitor Studi Kasus Pada PT. Bank Cimb Niaga Melawan PT. Sumatera Persadan Energi, *Humani*, Vol. 7, No. 2.
- Muhtarom , M. (2015) Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat, *Jurnal Suhuf*, No. 2.
- Pamungkas, Royfa Tri. (2021) Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Perusahaan Asuransi Yang Telah Dicabut Izin Usahanya, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2.
- Pasaribu, Mindo Kristiani, Raffles, dan Herlina Manik. (2024) Kedudukan Pemegang Polis dan Pekerja dalam Hal Terjadinya Kepailitan pada Perusahaan Asuransi, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 5, No. 1.
- Pasaribu, Riss Daniel Mikhael. (2024) Valuasi Kekayaan Intelektual: Penerapan Asas Going Concern Boedel Pailit, *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 8, No. 3.
- Purwanto, (Desember 2006) Pembaruan Defenisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 2, No. 2.
- Putra,Fani Martiawan Kumara. (2014) Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan, *Perspektif*, Vol. XIX, No. 1.
- Qabil, Callysta dan Arief Suryono. (2025) Problematika Pertimbangan Hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K/PDT.SUS-Pailit/2021, *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1.

- Retno Damayanti, dkk. (2023) Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Saija, Ronald. (Desember 2018) Perlindungan Kreditor Atas Pailit Yang Diajukan Debitor Dalam Proses Peninjauan Kembali di Pengadilan Niaga, *SASI*, Vol. 24, No. 2.
- Septiani, Vira Nadia, Iswi Hariyani, Bhim Prakoso, dan M. Afif Hasbullah. (2023) Akibat Hukum Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Atas Perusahaan Asuransi Ke Pengadilan Niaga Yang Diajukan Oleh Pemohon Yang Tidak Memiliki Legal Standing, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 7, No. 2.
- Tambuan, Fred B.G dalam Rudhy A. Lontoh. (2001) *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.
- Tobing, R. Sondang L, Dkk. (Mei 2022) Klausula Syarat Batal (Events of Devault) dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit Bank, *Soulusi*, Vol. 20, No. 2.
- Widhiawati, Premita Fifi, Fokky Fuad, dan Aris Machmud. (2024) Implementasi Program Penjaminan Polis Asuransi di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Vol. 21, No. 2.

## INTERNET

- Hukumonline.com, “Menyoal Perma 4/2019 Sebagai Dasar Menolak Legal Standing Pemohon Pailit “. Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/a/legal-standing-permohonan-pailit-lt61c3f9adb1632?page=2> diakses pada 20 Februari 2026.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna, lihat: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 15 Juni 2026.

Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers: Perkembangan Penanganan Pemenuhan Kewajiban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lihat: <https://jdih.ojk.go.id/> , diakses pada 15 Juni 2026.

Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-2/D.05/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum PT Asuransi Purna Artanugraha lihat: <https://jdih.ojk.go.id/> , diakses pada 15 Juni 2026.

Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-52/D.05/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia lihat: <https://jdih.ojk.go.id/> , diakses pada 15 Juni 2026.

Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-71/D.05/2022 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, lihat: <https://jdih.ojk.go.id/> , diakses pada 15 Juni 2026.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi  
Syariah.